

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah merupakan satu diantara banyak masalah lingkungan yang dialami oleh semua negara di dunia (Bundhoo, 2018:1). Seiring dengan peningkatan aktivitas manusia, timbulan sampah mengalami peningkatan pula (Chen et al., 2020:2-3). Timbulan sampah telah meningkat secara besar-besaran di dunia dalam beberapa dekade terakhir dan tidak ada tanda-tanda akan melambat. Diperkirakan pada tahun 2050, timbulan sampah kota di seluruh dunia diperkirakan meningkat sekitar 70 persen menjadi 3,4 miliar metrik ton (statista.com, 2023).

Dampak yang terjadi jika sampah tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai masalah serius bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat, sebagaimana dijelaskan identifikasi lima masalah utama: polusi, emisi gas rumah kaca, kebakaran, penyakit, dan erosi (Chandrappa & Das, 2012:4). Polusi terjadi akibat pencemaran tanah, air, dan udara dari sampah yang menumpuk, sementara emisi gas rumah kaca seperti metana dari pembusukan sampah berkontribusi pada perubahan iklim.

Kebakaran sering kali terjadi di lokasi pembuangan sampah ilegal, yang tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga melepaskan toksin berbahaya. Penyakit muncul dari vektor seperti tikus dan nyamuk yang berkembang biak di genangan sampah, meningkatkan risiko infeksi seperti leptospirosis. Terakhir, erosi tanah diperburuk oleh aliran air yang terhalang oleh sampah, yang dapat menyebabkan longsor dan kerusakan lahan pertanian. Masalah-

masalah ini menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang efektif untuk mencegah dampak jangka panjang pada keberlanjutan lingkungan dan kesehatan publik.

Sampah yang tidak dikelola dengan baik di negara berkembang sering disebabkan oleh beberapa faktor utama, seperti kurangnya infrastruktur persampahan yang disediakan oleh pemerintah, seperti fasilitas untuk pengumpulan, pemindahan, dan pemadatan sampah, yang menghambat proses pengelolaan yang efisien (Abubakar et al., 2022:15). Selain itu, kurangnya kepedulian masyarakat dalam mengelola sampah dengan baik, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan atau kurangnya partisipasi dalam pemilahan, memperburuk masalah ini dan mengurangi efektivitas program pengelolaan (Ferronato & Torretta, 2019:16). Kombinasi antara keterbatasan infrastruktur dan perilaku masyarakat ini menunjukkan perlunya intervensi pemerintah dan edukasi komunitas untuk meningkatkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di negara berkembang.

Implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada peran dan koordinasi antar aktor yang terlibat dalam proses pelaksanaan program (Edwards III, 1980:146). Dalam hal ini terdapat berbagai aktor kebijakan yang memiliki peran strategis, mulai dari pemerintah daerah sebagai regulator dan fasilitator, lembaga pengelola sampah sebagai pelaksana teknis, hingga masyarakat sebagai subjek sekaligus objek kebijakan (Nugroho, 2014:687). Namun, dalam praktiknya seringkali terjadi kesenjangan antara peran yang seharusnya dengan realitas di lapangan, seperti lemahnya koordinasi antar instansi, terbatasnya kapasitas lembaga pengelola sampah, dan rendahnya partisipasi aktif masyarakat.

Dalam pengelolaan sampah masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural (Suryani, 2014:79). Oleh karena itu, diperlukan identifikasi yang jelas mengenai bagaimana peran aktor kebijakan, termasuk pemerintah daerah, lembaga pengelola sampah,

dan masyarakat, dalam pelaksanaan suatu program dalam penanggulangan sampah, serta bagaimana hambatan atau dinamika interaksi antar aktor tersebut dalam mencapai tujuan program.

Mekanisme koordinasi menjadi aspek krusial dalam implementasi kebijakan yang melibatkan banyak pihak, karena tanpa koordinasi yang baik akan terjadi tumpang tindih kewenangan, inefisiensi sumber daya, dan ketidakjelasan akuntabilitas (Van Meter & Van Horn, 1975:465-470). Dalam suatu program, mekanisme koordinasi tidak hanya mencakup aspek vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga horizontal antar satuan kerja perangkat, serta dengan pihak swasta dan komunitas (Grindle, 1980:10). Selain itu, alokasi sumber daya baik finansial, manusia, maupun infrastruktur menjadi determinan penting dalam menentukan sejauh mana program dapat dijalankan secara optimal.

Strategi untuk memainkan peran vital dalam ruang publik agar dapat mengubah perilaku masyarakat dari pola konsumtif dan pembuangan sampah sembarangan menuju praktik yang lebih berkelanjutan (Ajzen, 1991:188). Namun, efektivitas strategi masih memerlukan kajian lebih lanjut. Dengan demikian, perlu diidentifikasi bagaimana mekanisme koordinasi, alokasi sumber daya, serta strategi komunikasi lingkungan diterapkan dalam implementasi branding tersebut, untuk memahami keterkaitan antara input kebijakan dengan proses implementasi di tingkat operasional.

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah perkotaan dan rumah tangga. Dengan mengalami pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan peningkatan konsumsi, timbulan sampah di Indonesia terus meningkat secara signifikan. Indonesia menghadapi masalah sampah yang serius sebagai salah satu negara penghasil sampah terbesar di dunia. Dampak yang ditimbulkan jika sampah dibiarkan menyebabkan gangguan

kesehatan karena menimbulkan berbagai penyakit, bau yang tidak sedap, pencemaran tanah, air dan kurangnya nilai kebersihan dan keindahan lingkungan (Nugraha et al., 2018:126). Akar masalah sampah terletak pada pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang cepat, yang meningkatkan produksi sampah tanpa infrastruktur yang memadai, serta perilaku konsumtif masyarakat yang menghasilkan sampah plastik dan organik dalam jumlah besar (Daniel Hoornweg, 2012:3-5).

Berdasarkan data sampah nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2023 Indonesia menghasilkan sebesar 18 juta ton sampah. Pada tahun 2023, produksi sampah nasional meningkat menjadi sebesar 23 juta ton, dan pada tahun 2024 produksi sampah meningkat sebesar 36 juta ton. Fenomena ini ditandai oleh peningkatan volume sampah seiring pertumbuhan populasi, di mana sampah plastik dan organik mendominasi. Sampah seringkali dibuang sembarangan ke sungai, laut, atau tempat pembuangan akhir (TPA), yang memperburuk kondisi lingkungan.

Akar masalah sampah di Indonesia meliputi beberapa faktor seperti perilaku masyarakat yang kurang sadar akan pengelolaan sampah, kebiasaan membuang sampah sembarangan dan kurangnya praktik daur ulang. Keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, termasuk TPA yang *overcapacity* dan sistem pengumpulan yang tidak merata. Ketiga, pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang cepat meningkatkan konsumsi barang sekali pakai, terutama plastik. Faktor keempat adalah regulasi yang belum sepenuhnya efektif, dengan sanksi yang lemah terhadap pelanggaran (Subekti, 2023:2-4).

Sampah di Indonesia berdasarkan data sampah nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tidak dikelola sekitar 37,46 %. Bagi masyarakat di Indonesia, mayoritas aktivitas yang dilakukan untuk mengelola sampah adalah dengan dibakar,

sebagian yang lain dengan membuangnya di tempat sampah kemudian diangkut petugas dan berakhir di TPA. Berdasarkan data SIPSN tahun 2025, setidaknya terdapat empat provinsi dengan angka timbunan sampah tertinggi di Indonesia sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Angka Timbunan Sampah Di Indonesia Tahun 2025

No	Provinsi	Angka Timbunan Sampah
1	DKI Jakarta	3.351.057,14 ton
2	Jawa Barat	3.150.500,93 ton
3	Jawa Timur	2.933.232,59 ton
4	Jawa Tengah	1.311.314,51 ton

(Sumber: SIPSN, 2026)

Dari data tabel di atas menunjukkan Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan timbunan sampah terbanyak di Indonesia dengan mencapai angka 3.351.057,14 ton. Angka tersebut sangat besar dibandingkan dengan beberapa provinsi lainnya, DKI Jakarta merupakan satu satunya wilayah yang kecil dibandingkan provinsi Jawa Timur dan lainnya. Sehingga dengan wilayah yang kecil DKI Jakarta termasuk dengan provinsi dengan penyumbang jumlah sampah terbanyak di Indonesia.

Dampak sampah terhadap lingkungan, kesehatan, dan ekonomi sangat signifikan. Secara lingkungan, sampah yang tidak dikelola menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara, serta berkontribusi pada perubahan iklim melalui emisi metana dari TPA (Damanhuri & Padmi, 2010:5-7). Dampak kesehatan meliputi penyebaran penyakit seperti demam berdarah dan leptospirosis akibat genangan sampah. Secara ekonomi, pengelolaan sampah yang buruk menimbulkan biaya tinggi untuk pemerintah, seperti pengangkutan dan pengolahan, yang mencapai triliunan rupiah per tahun. Banjir di beberapa daerah diperparah

oleh sampah yang menyumbat saluran drainase, menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial yang besar (Antara News, 2025).

Tabel 1. 2 Data Sumber Sampah di Indonesia Tahun 2025

Sumber Sampah	Persentase %	Jumlah
Rumah Tangga	56,7	19.851,03 Ton
Pasar	13,65	4.799,44 Ton
Perniagaan	7,58	2.655,13 Ton
Fasilitas Publik	7,03	2.459,73 Ton
Lainnya	6,13	2.146,57 Ton
Kawasan	4,68	1.640,16 Ton
Perkantoran	4,22	1.477,12 Ton

(Sumber: SIPSN, 2025)

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa Sumber Sampah di Indonesia Tahun 2025 yang bersumber dari SIPSN, terlihat bahwa rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar dengan persentase 56,7% atau sekitar 19.851,03 Ton, yang menunjukkan bahwa aktivitas domestik merupakan faktor dominan dalam timbulan sampah nasional. Posisi kedua ditempati oleh pasar sebesar 13,65% atau 4.799,44 Ton, yang mencerminkan tingginya aktivitas perdagangan bahan pangan dan komoditas konsumsi. Selanjutnya, sektor perniagaan (7,58%), fasilitas publik (7,03%), dan kategori lainnya (6,13%) turut memberikan kontribusi signifikan terhadap total timbulan sampah. Sementara itu, sumber sampah dari kawasan (4,68%) dan perkantoran (4,22%) memiliki proporsi relatif lebih kecil, namun tetap memerlukan pengelolaan yang sistematis.

Oleh sebab itu, dalam rangka mengatasi permasalahan sampah yang semakin kompleks, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi untuk menangani permasalahan sampah yang tertuai dalam landasan hukum yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang ini mengatur tentang prinsip pengelolaan sampah yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah dengan pendekatan berkelanjutan,

sehingga fokusnya adalah pada pengurangan timbulan sampah dari sumbernya dan pengelolaan yang ramah lingkungan.

Pengesahan Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah langkah krusial untuk menangani berbagai masalah limbah di Indonesia. Namun, upaya pemerintah seharusnya tidak hanya berhenti pada tahap penyusunan kebijakan, tetapi harus diikuti dengan tindakan yang nyata dan berkesinambungan agar isi undang-undang tersebut dapat diimplementasikan. Pada dasarnya, kebijakan publik lebih dari sekadar yang tertulis, tetapi berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah tertentu, sasaran utama dari kebijakan ini adalah untuk menginspirasi perubahan di lapangan, bukan hanya menjadi dokumen resmi, melainkan berfungsi sebagai panduan bagi tindakan konkret yang bisa menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan (Fadzoli dkk., 2023:28).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjadi pijakan hukum utama dalam penanganan persoalan persampahan. Meskipun demikian penerapannya belum berjalan maksimal khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Pengelolaan sampah masih didominasi pola kumpul, angkut, dan buang ke TPA bandar gebang yang kini sudah mengalami peningkatan volume timbulan sampah (Pratomo et al., 2023:5). Fasilitas pendukung seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), bank sampah, serta edukasi masyarakat masih terbatas. Di sisi lain, koordinasi antar lembaga dan penegakan hukum juga belum kuat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasinya sudah baik, masih membutuhkan analisis implementasi dalam kelembagaan untuk melihat hambatan dalam pelaksanaannya agar kebijakan ini dapat berjalan secara efektif.

Dalam mengatasi permasalahan sampah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, dengan tujuan sebagaimana di pasal 3 yaitu untuk (a) mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah; (b) meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan; (c) menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan (d) mewujudkan pelayanan prima.

Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 4 dan 5 juga tertulis bahwa yang melaksanakan tugas dan wewenang dalam pengelolaan sampah adalah Pemerintah Daerah dengan melakukan penyelenggaraan sebagaimana berada di Pasal 18 pengurangan sampah dan, penanganan sampah dengan melalui prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang berada pada pasal 50 yaitu terdiri atas (a) wadah sampah; (b). TPS; (c). TPS 3R; (d). TPST; (e). TPA; (f). sarana pengumpulan sampah; dan (g). sarana pengangkutan sampah.

Pemerintah DKI Jakarta dalam implementasi kebijakan publik mencakup fungsi regulasi, fasilitasi, dan pengawasan. Sebagai regulator, pemerintah daerah bertanggung jawab menetapkan aturan turunan, pedoman teknis, serta standar operasional yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan. Sebagai fasilitator, pemerintah daerah menyediakan sumber daya yang dibutuhkan, baik berupa anggaran, sarana prasarana, maupun sumber daya manusia. Sementara itu, fungsi pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan dijalankan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Ketiga fungsi ini harus berjalan secara simultan agar implementasi kebijakan dapat berjalan optimal (Nugroho, 2014:163).

Berdasarkan pengamatan awal, terdapat ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta tentang pengelolaan sampah, yang menyebabkan penumpukan sampah dan tingginya angka timbulan sampah, sehingga menimbulkan dampak terhadap lingkungan seperti wabah penyakit, bau tidak sedap, dan polusi udara akibat sampah yang menumpuk. Oleh karena itu, analisis implementasi terhadap kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang pengelolaan sampah menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan yang ada telah mampu menjawab kebutuhan pengelolaan sampah secara adil, efektif, dan berkelanjutan di Provinsi DKI Jakarta.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan sampah di Provinsi DKI Jakarta merupakan isu strategis yang semakin kompleks seiring dengan tingginya tingkat kepadatan penduduk. Kondisi demografis tersebut berdampak langsung pada meningkatnya volume timbulan sampah perkotaan. Aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat yang terus berkembang turut memperbesar jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari. Produksi sampah tahunan menunjukkan peningkatan konsisten setiap tahun sampai 2025 mencapai angka 3.351.057,14 ton. Kurangnya pengelolaan sampah menjadi faktor utama pendorong lonjakan timbulan sampah (Purwaningrum, 2016:141). Pengelolaan sampah yang belum sepenuhnya mampu mengimbangi peningkatan tersebut sehingga ketimpangan ini menimbulkan tantangan serius dalam sistem pengelolaan sampah perkotaan. Dengan demikian permasalahan sampah di DKI Jakarta tidak terlepas dari dinamika pengelolaan sampah dan kebijakan pengelolaan.

Tabel 1. 3 Angka Timbulan Sampah DKI Jakarta Tahun 2023-2025

Tahun	Angka Timbulan Sampah
2023	3.141.648,02 Ton
2024	3.171.247,6 Ton
2025	3.351.057,14 Ton

(Sumber: SIPSN, 2026)

Dari data diatas Angka Timbulan Sampah DKI Jakarta Tahun 2023–2025, terlihat adanya peningkatan timbulan sampah yang konsisten dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023, jumlah timbulan sampah tercatat sebesar 3.141.648,02 ton, kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi 3.171.247,6 ton, dan kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2025 hingga mencapai 3.351.057,14 ton. Kenaikan dari tahun 2023 ke 2024 relatif moderat, namun lonjakan pada tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan timbulan sampah yang lebih tajam dibandingkan tahun sebelumnya.

Data dari SIPSN menunjukkan bahwa DKI Jakarta mengalami peningkatan sampah setiap tahun hingga 2025 dan sebagian besar masih bergantung pada pembuangan akhir, bukan pada pengurangan dari sumber. Kondisi ini menunjukkan bahwa paradigma pengelolaan sampah belum sepenuhnya berorientasi pada circular system yang menekankan pencegahan dan pemanfaatan kembali sampah. Salah satu peneliti menemukan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam sistem pengelolaan sampah rumah tangga (Pratiwi, 2022:48). Hal ini mengindikasikan bahwa implementasinya masih menghadapi hambatan struktural, kultural, dan teknis. Dengan demikian, isu sampah tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga mencerminkan persoalan tata kelola publik yang membutuhkan pendekatan kolaboratif (Ummamah et al., 2024:9).

Dalam suatu pelaksanaan kegiatan, anggaran merupakan salah satu hal yang penting dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam

penanganan persampahan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Melalui alokasi anggaran, pemerintah daerah dapat menyediakan berbagai sarana, prasarana, serta operasional yang diperlukan untuk menunjang efektivitas pengelolaan sampah. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta setiap tahun mengalokasikan anggaran yang digunakan untuk belanja operasi maupun belanja modal dalam rangka menjalankan pengelolaan sampah. Rincian realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tersebut dapat dilihat pada tabel.

Tabel 1. 4 Anggaran Realisasi Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

No	Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Total
1	2024	2.196.899.915.295	Rp. 403.974.687.990	Rp. 2.600.874.603.285
2	2025	2.215.209.080.569	Rp. 2.034.611.497.734	Rp. 4.249.820.578.303

(Sumber: Laporan Keuangan DLH, 2025)

Berdasarkan tabel data di atas, menunjukkan bahwa total anggaran untuk pengelolaan sampah dari tahun 2024 ke tahun 2025 mengalami peningkatan. Dari yang 2,6 triliun menjadi 4,2 triliun. Baik belanja operasi dengan angka 2,1 triliun menjadi 2,2 triliun, dan pemerintah daerah mulai menambahkan pada belanja modal dari 403 miliar menjadi 2 triliun. Dengan meningkatnya belanja modal, pemerintah daerah menunjukkan upaya serius dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan pengelolaan lingkungan. Secara keseluruhan, struktur belanja tahun 2025 menandakan orientasi pembangunan layanan lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan, meskipun dengan melakukan penambahan anggaran hal tersebut tidak mengurangi jumlah volume timbulan sampah di Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta.

Dengan terjadinya peningkatan anggaran, untuk melihat manfaat dari anggaran tersebut dapat dilihat dalam total timbulan sampah yang merupakan indikator penting dalam

menilai efektivitas anggaran dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan di tiap kota Provinsi DKI Jakarta. Semakin rendah jumlah timbulan sampah yang dihasilkan, maka semakin besar pula manfaat dalam anggaran yang dikeluarkan terkait kebutuhan terhadap sarana, prasarana, serta sistem pengelolaan sampah yang efektif. Oleh karena itu, data mengenai timbulan sampah pada masing-masing kota administrasi menjadi penting untuk dianalisis guna mengetahui perkembangan volume sampah dari tahun ke tahun. Adapun data timbulan sampah pada setiap kota di DKI Jakarta selama periode 2023–2025 dapat dilihat pada tabel.

Tabel 1. 5 Angka Timbulan Sampah Tiap Kota di DKI Jakarta tahun 2023-2025

No	Kota	2023	2024	2025
1	Jakarta Timur	851,613.56 ton	859,045.05 ton	866.562,58ton
2	Jakarta Barat	748.135,24 ton	757.857,05 ton	807.966,6 ton
3	Jakarta Selatan	719.463,79 ton	725.690,82 ton	731.982,61ton
4	Jakarta Utara	504.560,46 ton	509.694,50 ton	624.714,06 ton
5	Jakarta Pusat	311.242,80 ton	312.221,09 ton	313.203,39 ton
6	Kepulauan Seribu	6.634,27 ton	6.739,09 ton	6.627,9 ton

(Sumber: SIPSN, 2026)

Berdasarkan tabel data di atas, dari enam kota di DKI Jakarta, tercatat bahwa kota Administrasi Jakarta Timur adalah kota dengan angka timbulan sampah terbesar tahun 2025 sebanyak 866.562,58 ton, dan Kepulauan Seribu dengan angka timbulan sampah 6.627,9 ton, Jakarta Timur merupakan salah satu kota administrasi dengan produksi sampah tertinggi sehingga menjadi permasalahan terhadap pengelolaan sampah, Jakarta Timur sebagai wilayah kota administratif terpadat di Jakarta, memiliki kontribusi terbanyak terhadap total timbulan sampah DKI Jakarta. Meskipun pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya seperti optimalisasi fasilitas pengelolaan sampah, namun realisasi masih belum sejalan

dengan kebutuhan pengelolaan jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa Jakarta Timur terkendala dalam kebijakan pengelolaan sampah.

Tercatat pada tahun 2021 menghasilkan 836.961,37 sampah per ton, pada tahun 2022 meningkat menjadi 844.252,42 ton per tahun, pada tahun 2023 meningkat lagi sebanyak 851.613.56 ton, pada tahun 2024 meningkat lagi menjadi 859.045,05 ton, dan pada tahun 2025 meningkat lagi menjadi 866.562,58 ton. Angka tertinggi terdapat pada tahun 2025 hal ini dipengaruhi oleh kepadatan penduduk tinggi, perilaku masyarakat, aktivitas industri, dan pasar tradisional seperti Pasar Kramat Jati, Pasar Jatinegara, Pasar Cakung, dan Pasar Ciracas. Dibandingkan dengan kota administratif lainnya, Jakarta timur dengan masalah utama seperti aktivitas masyarakat dengan pembuangan sampah liar di sungai Ciliwung dan kurangnya tempat pengelolaan sampah.

Tabel 1. 6 Komposisi Sampah Jakarta Timur Berdasarkan Jenis Sampah Tahun 2025

Tahun	Sisa Makanan	Plastik	Kertas-Karton	Kayu-Ranting	Logam	Kain
2025	49,87	22,95	17,24	3,18	1,08	0,9

(Sumber: SIPSN, 2026)

Dari tabel data di atas menunjukkan bahwa timbulan sampah didominasi oleh sisa makanan sebesar 49,87%, yang menegaskan bahwa aktivitas konsumsi rumah tangga merupakan kontributor utama sampah dan sekaligus menunjukkan besarnya peluang pengurangan melalui pengelolaan sampah organik berbasis sumber. Selanjutnya, sampah plastik (22,95%) serta kertas dan karton (17,24%) membentuk porsi signifikan sampah anorganik, mencerminkan pola konsumsi masyarakat perkotaan yang masih tinggi terhadap produk berkemasan dan barang sekali pakai. Adapun jenis sampah lain seperti kayu dan ranting

(3,18%), logam (1,08%), dan kain (0,9%) memiliki persentase relatif kecil namun tetap memerlukan strategi penanganan khusus sesuai karakteristik dan potensi daur ulangnya.

Kota Administrasi Jakarta Timur telah menjadi kota tertinggi angka timbulan sampah sehingga menghadapi tantangan serius dalam pengurangan sampah dari sumbernya, di mana produksi sampah tahunan terus meningkat seiring dengan waktu. Maka dibutuhkan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah, Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang yaitu melalui TPS 3R, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Dari data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bahwa Jakarta Timur memiliki 436 jumlah TPS.

Tabel 1. 7 Data Prasarana Pengelolaan Sampah Jakarta Timur

Wilayah	Jenis TPS					
	Tipe 1	Tipe 2	Tipe 3	Tipe 4	TPS 3R	Jumlah
Jakarta Timur	38	69	68	257	7	436

(Sumber: Bidang PSLB3, sesuai inputan pada SIPSN)

Berdasarkan data tersebut, Jakarta Timur memiliki total 436 Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang terdiri dari berbagai jenis dan tipe pelayanan pengelolaan sampah. TPS Tipe 4 mendominasi dengan jumlah 257 yang menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah masih bertumpu pada penampungan berskala besar. Selanjutnya, TPS Tipe 2 dan Tipe 3 masing-masing berjumlah 69 dan 68, yang berfungsi sebagai penampungan antara sebelum sampah diangkut ke tahap berikutnya. TPS Tipe 1 tercatat sebanyak 38 dengan kapasitas dan fungsi yang relatif lebih terbatas. Sementara itu, keberadaan TPS 3R berjumlah 7 unit, Secara penerapannya TPS 3R memiliki 4 tempat sejak tahun 2022 pondok kelapa, pondok kopi, cililitan, dan ujung menteng dengan menggunakan APBD DKI Jakarta, pada

tahun 2023 bertambah menjadi 6 dengan penambahan lokasi di penggilingan, dan asrama ciracas, pada tahun 2024 bertambah menjadi 7 dengan penambahan lokasi rawa terate.

Prasarana pengelolaan sampah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang terdiri atas 436 TPS dengan berbagai tipe, secara jumlah menunjukkan bahwa pemerintah telah menyediakan fasilitas pengelolaan sampah. Keberadaan TPS Tipe 1 hingga Tipe 4 serta 7 Unit TPS 3R menjadi bagian dari upaya pengurangan dan penanganan sampah sebelum diangkut ke tempat pemrosesan akhir. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa prasarana tersebut belum memadai untuk mengatasi tingginya produktivitas timbulan sampah. Beberapa TPS di kawasan padat seperti Kecamatan Cakung dan Kecamatan Duren Sawit sering mengalami overkapasitas sehingga terjadi penumpukan sampah di luar area penampungan. Selain itu, TPS di kawasan jatinegara masih ditemukan terbuka yang menimbulkan bau tidak sedap serta pencemaran lingkungan di sekitar permukiman (Antara, 2025).

TPS 3R di wilayah Kecamatan Ciracas yang seharusnya membantu proses pemilahan dan pengolahan sampah, namun operasionalnya belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah prasarana yang telah mencapai sebanyak 436 unit, hal tersebut belum memadai untuk mengatasi produktivitas sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur, sehingga diperlukan analisis penggunaan prasarana pengelolaan sampah, agar optimalisasi fungsi prasarana TPS mampu mengimbangi volume sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur secara efektif.

Tabel 1. 8 Data Sarana Pengelolaan Sampah Jakarta Timur

No	Data Kendaraan	Jumlah
1	Wheel Loader	14
2	Dump Truk Besar	130

3	Dump Truk Kecil	90
4	Mini Dump	15
5	Arm Roll Besar	36
6	Arm Roll Kecil	44
7	Compactor Besar	80
8	Compactor Kecil	31
9	Tronton	8
10	Road Sweeper Besar	12
11	Road Sweeper Kecil	4
12	Pick Up	32
13	Double Cabin	6
14	Mobil Uji Emisi	1
15	Germor	89
16	Mobil Tangki	8
17	Total	602

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2026)

Dari tabel data di atas, menunjukkan bahwa sarana kendaraan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur sebanyak 602, yang menunjukkan kapasitas dukungan operasional pengelolaan sampah yang cukup besar. Jenis kendaraan dengan jumlah terbanyak adalah dump truk besar (130 unit), dump truk kecil (90 unit), compactor besar (80 unit), dan germor (89 unit), yang berperan utama dalam pengangkutan sampah dari sumber ke TPS maupun ke fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir. Keberadaan arm roll besar (36 unit) dan arm roll kecil (44 unit) memperkuat sistem pengangkutan kontainer sampah, khususnya di wilayah dengan volume sampah tinggi. Sementara itu, sarana pendukung seperti wheel loader (14 unit) dan tronton (8 unit) mendukung aktivitas penanganan sampah berskala besar dan pemindahan material. Kendaraan kebersihan jalan seperti road sweeper besar (12 unit) dan road sweeper kecil (4 unit) menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan ruang publik. Selain itu, kendaraan pendukung lain seperti pick up (32 unit), double cabin (6 unit), mobil tangki (8 unit), dan mobil uji emisi (1 unit) berfungsi menunjang operasional teknis dan pengawasan lingkungan.

Sarana pengelolaan persampahan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang terdiri atas 602 Unit sarana pengelolaan sampah dengan bergai macam mulai dari dump truk, arm roll, compactor, road sweeper, hingga kendaraan pengangkut skala kecil seperti germor. Secara kuantitas, ketersediaan sarana tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya mendukung proses pengangkutan dan penanganan sampah dari TPS menuju tempat pengolahan akhir.

Kendaraan germor yang digunakan di lingkungan permukiman sempit memiliki kapasitas angkut terbatas sehingga proses pengumpulan sampah berlangsung lebih lambat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah sarana yang telah mencapai sebanyak 602 Unit, hal tersebut belum memadai untuk mengatasi produktivitas sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur, sehingga diperlukan analisis pelaksanaan sarana pengelolaan sampah, agar optimalisasi fungsi sarana pengelolaan sampah mampu mengimbangi volume sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur secara efektif.

Secara keseluruhan, ketersediaan sarana ini mencerminkan kesiapan infrastruktur pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur, meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada optimalisasi pemanfaatan dan pemeliharaan armada. Pengukuran produktivitas tempat pengelolaan sampah itu sendiri merujuk pada indikator yang sejalan dengan kerangka pengelolaan sampah perkotaan yang menekankan tempat pengelolaan sampah untuk mengurangi volume timbulan sampah dan peningkatan daur ulang dengan prinsip 3R sebagaimana dijelaskan oleh (Yedla dan Bala Subramanian, 2011:461). Sementara di tingkat kelembagaan, tantangan dapat berasal dari birokrasi yang kompleks, terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, dan belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi (Kosaza, 2022:55).

Kebijakan pengelolaan sampah di DKI Jakarta telah dibuat dan dilaksanakan, Khususnya di Kota Administrasi Jakarta Timur hingga tahun 2025, akan tetapi masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Permasalahan seperti meningkatnya jumlah volume timbulan sampah sehingga menimbulkan dampak terhadap lingkungan seperti wabah penyakit, bau tidak sedap, dan polusi udara akibat sampah yang menumpuk (Nisa et.al, 2025:179), hal ini menunjukkan perlunya analisis menyeluruh terhadap implementasi kebijakan yang telah dibuat. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan untuk menjawab sejauh mana kebijakan tersebut telah dilaksanakan sesuai tujuan, dan apa saja kendala yang dihadapi terhadap kebijakan pengelolaan sampah di DKI Jakarta khususnya di Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2025.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka adapun pertanyaan penelitian ini adalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2025?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2025?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu tujuan akademik dan tujuan praktis.

1.4.1 Tujuan Akademik

Dari sisi akademik, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain meliputi:

1. Untuk mengidentifikasi dan menuraikan proses implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2025.
2. Untuk mengidentifikasi dan menguraikan mengenai faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang pengelolaan sampah di Kota Administasi Jakarta Timur tahun 2025.

1.4.2 Tujuan Praktis

Selain dari tujuan akademik di atas, adapun tujuan praktis dari penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu prasyarat dalam meraih gelar sarjana Ilmu Politik (S.Ipol) pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia.
2. Hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah untuk menurunkan jumlah timbulan sampah khususnya di Kota Administrasi Jakarta Timur 2025.

1.5 Signifikansi Penelitian

Berangkat dari tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki dampak yang signifikan. Adapun signifikansi dari penelitian ini terdiri dari signifikansi akademik dan praktis.

1.5.1 Signifikansi Akademik

Dalam signifikansi akademik, penelitian ini akan berkaitan dengan implementasi kebijakan, khususnya kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur. Penelitian ini bukanlah hal yang baru mengenai pengelolaan sampah dalam bidang akademik, dan banyak peneliti sebelumnya yang telah mengkaji topik ini dari berbagai sudut pandang, termasuk teknik operasional, keterlibatan masyarakat, dan kebijakan lingkungan. Penelitian ini memiliki pembeda dari studi terdahulu karena memfokuskan pada studi kasus di Kota Administrasi Jakarta Timur dengan fokus tahun 2025. Secara akademik penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan penelitian implementasi kebijakan publik di tingkat daerah, khususnya di wilayah perkotaan. Dengan demikian, penelitian ini membantu memperluas pemahaman akademik mengenai dinamika implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat kota baik di Kota Administrasi Jakarta Timur maupun kota lain.

1.5.2 Signifikansi Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah DKI Jakarta sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah khususnya di Kota Administrasi Jakarta Timur. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi instansi terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan responsif terhadap permasalahan persampahan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik serta

mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur.

1.6 Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dari penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini juga akan diuraikan terkait perbedaan dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Afifah Hadiyatullah, Bambang Kusbandrijo, dan Joko Widodo (2025) berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bima (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima) membahas pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat pemerintah daerah dengan fokus pada peran Dinas Lingkungan Hidup. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menganalisis faktor-faktor implementasi kebijakan seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal akibat keterbatasan sarana prasarana, sumber daya manusia, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
2. Penelitian ini dilakukan oleh Yuliarto Mokodompis, Markus Kaunang, dan Ventje Kasenda (2019) berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Manado menganalisis pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah pada tingkat pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengkaji faktor-faktor implementasi kebijakan seperti komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di Kota Manado belum berjalan optimal akibat rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta lemahnya koordinasi antarinstansi pelaksana. Selain itu, kurangnya

fasilitas seperti TPS 3R dan bank sampah turut mempengaruhi efektivitas kebijakan di lapangan.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Andi Cahyadi (2018) berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah di Kabupaten Purbalingga menganalisis pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah berbasis bank sampah di tingkat pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengacu pada model implementasi kebijakan Ripley dan Franklin untuk menilai efektivitas pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan bank sampah di Kabupaten Purbalingga belum berjalan secara optimal, meskipun telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dan praktik daur ulang. Kendala utama yang ditemukan meliputi keterbatasan sumber daya, belum meratanya partisipasi masyarakat, serta dukungan kelembagaan yang masih perlu diperkuat.
4. Penelitian ini dilakukan oleh Tiwi Okhtafianmy (2023) berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Payakumbuh mengkaji pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen pada Dinas Lingkungan Hidup, pelaku usaha, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana prasarana pendukung, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemilahan dan pengurangan sampah dari sumbernya. Selain itu, koordinasi antarinstansi dan konsistensi pengawasan kebijakan masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program persampahan.
5. Penelitian ini dilakukan oleh Ghaisal Ramadhan, Herbasuki Nurcahyanto, dan Tri Yuniningsih (2024) berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi menganalisis pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah pada tingkat pemerintah daerah dengan menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan Edward III. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk menilai efektivitas implementasi

berdasarkan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di Kota Bekasi belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala pada aspek komunikasi kebijakan yang belum merata, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta koordinasi antarinstansi yang belum maksimal.

Berbagai penelitian terdahulu seperti Afifah Hadiyahatullah, dkk (2025), Yuliarto Mokodompis, dkk (2019), Andi Cahyadi (2018), Tiwi Okhtafianny (2023), Ghaisal Ramadhan, dkk (2024) memiliki kesamaan dalam mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan sampah, akan tetapi penelitian terdahulu memiliki fokus objek, lokasi, dan tahun yang berbeda. Penelitian terdahulu pada umumnya mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan sampah dari perspektif umum, seperti efektivitas pelaksanaan program 3R, peran Dinas Lingkungan Hidup, partisipasi masyarakat melalui bank sampah, serta hambatan kelembagaan dan teknis di berbagai daerah seperti Manado, Bekasi, Purbalingga, Payakumbuh, dan Kota Bima. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini secara khusus berfokus pada implementasi kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta tentang pengelolaan sampah dengan fokus pada aspek di Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2025. Penelitian ini memberikan kontribusi baru karena menyoroti secara spesifik efektivitas implementasi kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta tentang pengelolaan sampah dengan fokus di Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2025.

1.7 Landasan Teori/Konseptual

1.7.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi dalam konteks kebijakan publik dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan keputusan yang telah dibuat. Proses implementasi berperan penting dalam

mengantarkan kebijakan publik kepada masyarakat agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Pressman dan Wildavsky (2020:21-22) implementasi mencakup beberapa kata kunci, seperti menjalankan kebijakan, menghasilkan output sesuai tujuan kebijakan, dan menyelesaikan misi yang harus dicapai. Istilah implementasi menunjukkan serangkaian kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan dan hasil program yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. (Sufi, 2022:5) berpendapat Penerapan kebijakan ini melibatkan proses yang meliputi pengesahan peraturan perundangan, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, kesiapan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, serta dampak nyata keputusan baik yang diharapkan maupun tidak. Dalam persiapan implementasi, perlu memastikan ketersediaan sumber daya, rencana, dan arahan yang dapat diterima serta dijalankan oleh pihak terkait.

Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah Tahap penyelenggaran kebijakan segera setelah ditetapkan menjadi undang-undang. Dalam pandangan luas implementasi diartikan sebagai pengadminis-trasian undang-undang kedalam berbagai aktor, organisasi, prosedur, yang bekerja secara bersama untuk mencapai tujuan dan dampak yang ingin diupayakan oleh kebijakan tersebut (Lester & Stewart, 2000:104).

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Udoji, seorang pakar kebijakan asal Afrika (Manongga, 2021:66), menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah hal penting dan mungkin lebih penting daripada pembuatan kebijakan itu sendiri. Kebijakan yang hanya berupa impian atau rencana bagus akan sia-sia jika tidak diimplementasikan dengan baik.

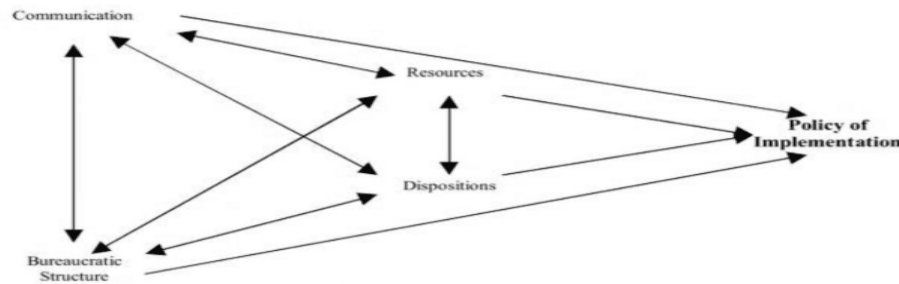
Tahapan operasional dalam implementasi kebijakan (Deddy, 2016:69) mencakup beberapa langkah yang saling terkait. Tahap pertama adalah interpretasi, di mana kebijakan abstrak dikembangkan menjadi petunjuk pelaksanaan teknis melalui proses komunikasi dan sosialisasi. Kebijakan ini dituangkan dalam bentuk peraturan perundangan seperti Peraturan Daerah dan Undang-Undang, serta keputusan eksekutif dan manajerial. Selanjutnya, pada tahap pengorganisasian, dilakukan penentuan pelaksana kebijakan, penentuan prosedur operasi standar (SOP) atau standar pelayanan minimal (SPM), serta pengaturan pembiayaan dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Manajemen pelaksanaan dan jadwal implementasi juga ditetapkan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

1.7.2 Model Implementasi Kebijakan George Edwards III

Model implementasi kebijakan menurut teori Model George Edwards III (1980:1), mengemukakan dalam proses implementasi kebijakan, komunikasi memegang peranan penting karena pelaksana harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Perintah untuk melaksanakan kebijakan harus diteruskan kepada implementor secara tepat, dan konsisten. Kurangnya sumber daya akan berakibat ketidak-efektifan penerapan kebijakan. Disposisi atau kecenderungan sikap pelaksana diartikan sebagai keinginan dan kesepakatan di kalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan akan dilaksanakan secara efektif, maka implementor bukan hanya mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan memiliki kemampuan untuk menerapkannya, tetapi para implementor juga harus mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Akhirnya struktur

birokrasi mempunyai dampak atas penerapan dalam arti bahwa penerapan itu tidak akan berhasil jika terdapat kekurangan dalam struktur birokrasi tersebut.

Gambar 1. 1 Model Implementasi Kebijakan menurut Edwards III



(Sumber: Edwards, 1980)

1. *Communication* (Komunikasi)
Edwards III (1980:17) menegaskan: Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, jika perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang benar-benar mampu melaksanakannya. Jika pesan dan perintah kebijakan yang diberikan oleh pembuat kebijakan tidak jelas dan tidak terspesifikasikan, maka kemungkinan besar akan terjadi kesalahpahaman di tingkat implementor kebijakan yang ditunjuk. Jelas sekali akan terjadi kebingungan di tingkat implementor, khususnya dalam memahami dekripsi tugas yang harus dilakukannya. Kondisi ini akan memberi peluang kepada mereka untuk tidak mengimplementasikan kebijakan tersebut sebagaimana dikehendaki oleh para pemberi mandat atau pembuat kebijakan.
2. *Resources* (Sumber Daya)
Sehubungan dengan faktor Resources (Sumber Daya), Edwards III (1980:53) menjelaskan: Sumber daya yang penting meliputi staf yang tepat dengan keahlian yang dibutuhkan. Sumber daya tidak hanya mencakup jumlah sumber daya manusia atau aparat semata melainkan juga mencakup kemampuan sumber daya manusia untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dapat menjelaskan tesa bahwa sumber daya yang memadai dan memenuhi kualifikasi akan menghasilkan kinerja dalam implementasi kebijakan yang tepat dan efektif.
3. *Dispositions or attitudes* (Sikap Pelaksana)
Edwards III (1980:89) menjelaskan: Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam proses implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, maka para implementor kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kebanyakan para implementor menggunakan sedapat mungkin otoritas dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Salah satu alasan mengenai hal ini

disebabkan independensi mereka terhadap eksistensi dari pembuat kebijakan. Meskipun cara lain para implementor menggunakan otoritasnya tergantung dari kecenderungan sikap mereka yang mengacu kepada kebijakan-kebijakan tersebut, namun pada akhirnya sikap merekalah yang akan mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana mereka melihat kebijakan akan berdampak terhadap kepentingan perorangan dan organisasi mereka.

4. *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi)

Edwards III (1980:125) menjelaskan: Meskipun sumber daya dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia untuk melaksanakannya, tapi terkadang proses implementasi kebijakan masih terhambat oleh in-efisiensi struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan proses implementasi sebuah kebijakan. Standar prosedur operasional untuk menangani tugas rutin sebagaimana biasanya mereka tangani. Sayangnya standar dirancang untuk kebijakan-kebijakan yang telah berjalan dan kurang dapat berfungsi dengan baik untuk kebijakan-kebijakan baru sehingga sulit terjadi perubahan, penundaan, pembaharuan, atau tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki. Standar kadang-kadang lebih menghambat

Dalam penelitian ini, model implementasi kebijakan menurut Edwards III akan digunakan sebagai teori pertama atau *grand teory*. Pemilihan teori model implementasi kebijakan menurut Edwards III didasarkan pada penempatan proses implementasi sebagai fokus untuk memberikan kerangka analitis yang jelas, sistematis, dan langsung berhubungan dengan karakter implementasi kebijakan, serta dapat digunakan untuk memberikan analitis sehingga fokusnya pada proses, perilaku aktor, dan kondisi organisasi, sehingga hal tersebut sangat sesuai untuk mengungkap proses implementasi kebijakan di lapangan. Model ini membantu peneliti menggali bagaimana interaksi antar pelaksana memengaruhi hasil implementasi. Dengan demikian, model ini dianggap paling tepat untuk mendukung tujuan penelitian dalam menjelaskan proses implementasi.

1.7.3 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi George Edwards III

Menurut Edwards III (1980:147), proses kebijakan tidak berhenti pada tahap pengesahan undang-undang, penerbitan peraturan, maupun penetapan putusan pengadilan, tetapi berlanjut pada tahap implementasi yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan. Edwards III menjelaskan bahwa implementasi dipengaruhi oleh interaksi antara komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu, beberapa jenis kebijakan memiliki kecenderungan lebih besar menghadapi permasalahan implementasi dibandingkan kebijakan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan implementasi melalui faktor yang mempengaruhi implementasi, baik oleh lembaga eksekutif maupun lembaga peradilan, serta melalui berbagai alternatif penyelesaian lainnya guna mengatasi hambatan implementasi kebijakan.

Model implementasi kebijakan menurut George Edwards III (1980:147-164), juga menjelaskan faktor yang mempengaruhi baik penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan sebagai berikut: isi Kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi. Mengimplementasikan kebijakan pasti terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung dari implementasi kebijakan, untuk itu perlu adanya usaha meminimalisir resiko dengan memenuhi syarat-syarat implementasian kebijakan

Edwards III menjelaskan implementasi kebijakan memiliki beberapa faktor yang dipengaruhi antara lain (1980:147-164):

1. *Policiy* (Isi Kebijakan)
tidak semua jenis kebijakan memiliki tingkat kesulitan implementasi yang sama. Klasifikasi kebijakan yang selama ini digunakan dalam ilmu politik belum cukup untuk menjelaskan mengapa suatu kebijakan berhasil atau gagal diimplementasikan. Oleh karena itu, Edwards III menjelaskan isi kebijakan berdasarkan karakteristik yang berpotensi menimbulkan pengaruh implementasi. Kebijakan yang cenderung menghadapi pengaruh implementasi meliputi

Kebijakan baru (*new policies*), kebijakan yang belum pernah diterapkan sebelumnya sehingga pelaksana maupun masyarakat belum memiliki pengalaman dalam menjalankannya, sehingga kondisi ini sering menimbulkan ketidakjelasan mengenai prosedur, pembagian tugas, maupun mekanisme pelaksanaan sehingga berpotensi menimbulkan hambatan implementasi.

Kebijakan yang bersifat desentralisasi (*decentralized policies*), kebijakan desentralisasi merupakan kebijakan yang pelaksanaannya melibatkan berbagai tingkat pemerintahan atau organisasi, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi pelaksana. Banyaknya aktor yang terlibat menyebabkan koordinasi, komunikasi, serta pembagian kewenangan menjadi lebih kompleks sehingga implementasi sering mengalami kendala.

Kebijakan yang kontroversial (*controversial policies*), kebijakan kontroversial adalah kebijakan yang menimbulkan perbedaan pendapat atau penolakan dari masyarakat maupun kelompok kepentingan. Perbedaan kepentingan tersebut dapat mengurangi dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan sehingga implementasinya menjadi lebih sulit.

Kebijakan yang kompleks (*complex policies*), kebijakan kompleks adalah kebijakan yang memiliki tujuan, prosedur, sasaran, atau aktor pelaksana yang banyak dan saling berkaitan. Kompleksitas tersebut meningkatkan kebutuhan akan koordinasi, sumber daya, dan pengawasan sehingga risiko kegagalan implementasi menjadi lebih besar.

Kebijakan yang berkaitan dengan kondisi krisis (*crisis-related policies*), kebijakan ini diterapkan untuk menghadapi situasi darurat atau krisis, seperti bencana alam, pandemi, konflik, maupun keadaan luar biasa lainnya. Pelaksanaannya biasanya harus dilakukan dalam waktu singkat dengan kondisi yang tidak pasti sehingga membutuhkan respons cepat, fleksibilitas, dan sumber daya yang memadai.

serta kebijakan yang dibentuk melalui keputusan lembaga peradilan (*judicial policies*), yaitu kebijakan yang lahir sebagai konsekuensi dari putusan lembaga peradilan, sehingga pemerintah atau instansi terkait diwajibkan untuk melaksanakan isi putusan tersebut. Menurut Edwards III, suatu kebijakan juga dapat memiliki kombinasi dari beberapa karakteristik tersebut (*combinations of characteristics*), sehingga tingkat kesulitan implementasinya menjadi semakin tinggi. Isi kebijakan dapat menjadi penghambat implementasi karena isi kebijakan tersebut bisa baru, terdesentralisasi, kontroversial, kompleks, krisis, yang didirikan oleh pembuat kebijakan itu sendiri.

2. *Follow up* (Dukungan)

Faktor pengaruh implementasi kebijakan tidak hanya perlu diidentifikasi, tetapi juga harus diikuti dengan upaya perbaikan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif. Salah satu cara yang paling mendasar untuk meningkatkan keberhasilan implementasi adalah melalui mekanisme dukungan (*follow-up*). Tindak lanjut merupakan proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan untuk memastikan bahwa keputusan, instruksi, atau peraturan benar-benar dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Edwards III menegaskan bahwa faktor pengaruh implementasi terjadi bukan

karena kebijakan yang dirumuskan kurang baik, melainkan karena tidak adanya pengawasan dan tindak lanjut dari pembuat kebijakan terhadap pelaksanaannya. Dukungan dapat menjadi pendukung implementasi jika para pelaksana dan pembuat kebijakan mendukung dalam suatu kebijakan tersebut. Ketika suatu kebijakan berjalan tanpa adanya dukungan, maka kebijakan tersebut sulit untuk berjalan.

3. *potential of other remedies* (Pembagian Potensi)

peningkatan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada mekanisme tindak lanjut oleh pelaksana maupun pembuat kebijakan, tetapi juga memerlukan berbagai alternatif penyelesaian (*potential of other remedies*). Langkah awal dalam merumuskan alternatif tersebut adalah mengidentifikasi secara tepat berbagai hambatan yang menyebabkan implementasi kebijakan tidak berjalan secara optimal. Setelah penyebab hambatan diketahui, maka dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan yang sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi. Perbaikan harus disesuaikan dengan kondisi dan penyebab yang melatarbelakangi hambatan implementasi. Berbagai alternatif penyelesaian dapat berupa penyempurnaan isi kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi antarorganisasi, penyediaan sumber daya yang memadai, penyempurnaan prosedur kerja, maupun bentuk perbaikan lainnya yang relevan dengan kebutuhan implementasi. Dengan demikian, *potential of other remedies* merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya penyelesaian masalah secara kontekstual dan adaptif, sehingga implementasi kebijakan dapat berlangsung lebih efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pembagian Potensi berkaitan dengan koordinasi masyarakat yang luas dan potensi yang harus di tingkatkan. Koordinasi menjadi titik tentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan

Beberapa faktor yang mempengaruhi baik pendukung dan penghambat implementasi kebijakan menurut George Edwards III (1980:147-164), Pemilihan faktor pengaruh didasarkan pada penempatan faktor yang menghambat dan mendukung proses implementasi sebagai fokus untuk memberikan kerangka analitis yang jelas, dan langsung berhubungan dengan karakter implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor, sehingga hal tersebut sangat sesuai untuk mengungkap dinamika implementasi kebijakan di lapangan. Faktor ini membantu peneliti menggali faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung proses implementasi kebijakan, dengan demikian ini dianggap paling tepat untuk

mendukung tujuan penelitian dalam menjelaskan faktor yang mempengaruhi baik penghambat dan pendukung implementasi.

1.7.4 Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan dengan tujuan untuk mengurangi dan menangani sampah. Melalui pengelolaan sampah, masalah pencemaran lingkungan akibat penumpukan sampah dapat diatasi dengan baik.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pengelolaan sampah mencakup dua aspek utama. Pertama, pengurangan sampah yang melibatkan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Dengan demikian, produksi sampah dapat dikurangi sebanyak mungkin, dan limbah yang dihasilkan dapat dimanfaatkan kembali untuk mengurangi beban lingkungan. Kedua, penanganan sampah yang mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Proses ini melibatkan pengelompokan dan pemisahan sampah berdasarkan jenis, jumlah, dan sifatnya, kemudian dilanjutkan dengan mengambil dan memindahkan sampah dari sumbernya ke tempat penampungan atau tempat pengolahan sampah terpadu. Selanjutnya, sampah diolah untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlahnya, sebelum akhirnya diolah secara aman sehingga tidak mencemari lingkungan. Pengelolaan sampah menjadi kunci penting dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan serta menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam pengelolaan sampah di DKI Jakarta Dinas Lingkungan Hidup terbentuk sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kota.

Susunan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri atas:

1. **Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur**, sebagai perangkat kota yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sampah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.
2. **Seksi Pengelolaan Sampah Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur**, yang bertugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, serta mengevaluasi kegiatan pengurangan dan penanganan sampah di tingkat kota administrasi.
3. **Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan**, yang bertanggung jawab melaksanakan operasional pengelolaan sampah di wilayah kecamatan, termasuk pengangkutan sampah, pengawasan Tempat Penampungan Sementara (TPS), serta pembinaan kepada masyarakat.
4. **Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)**, yang bertanggung jawab terhadap penerimaan, pemilahan, pengolahan, dan pengurangan volume sampah sebelum diangkut ke tempat pengolahan atau pemrosesan akhir.

5. **Masyarakat**, sebagai penghasil sampah yang memiliki kewajiban melakukan pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian menunjukkan bahwa susunan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang jelas pada setiap tingkatan pelaksana. Suku Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai penanggung jawab utama dalam perencanaan, koordinasi, dan pengendalian kebijakan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur, yang didukung oleh Seksi Pengelolaan Sampah sebagai koordinator serta Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan dalam pelaksanaan operasional di lapangan. Sementara itu, TPS dan TPST berfungsi sebagai sarana utama dalam proses penerimaan, pemilahan, serta pengolahan sampah sebelum dikirim ke tempat pemrosesan akhir. Di sisi lain, masyarakat memiliki peran penting sebagai pelaku utama dalam melakukan pengurangan dan pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Pembagian peran tersebut mencerminkan adanya keterpaduan antara unsur pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Setiap unsur mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara optimal, dengan tujuan pengelolaan sampah yang lebih efektif dalam mewujudkan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur.

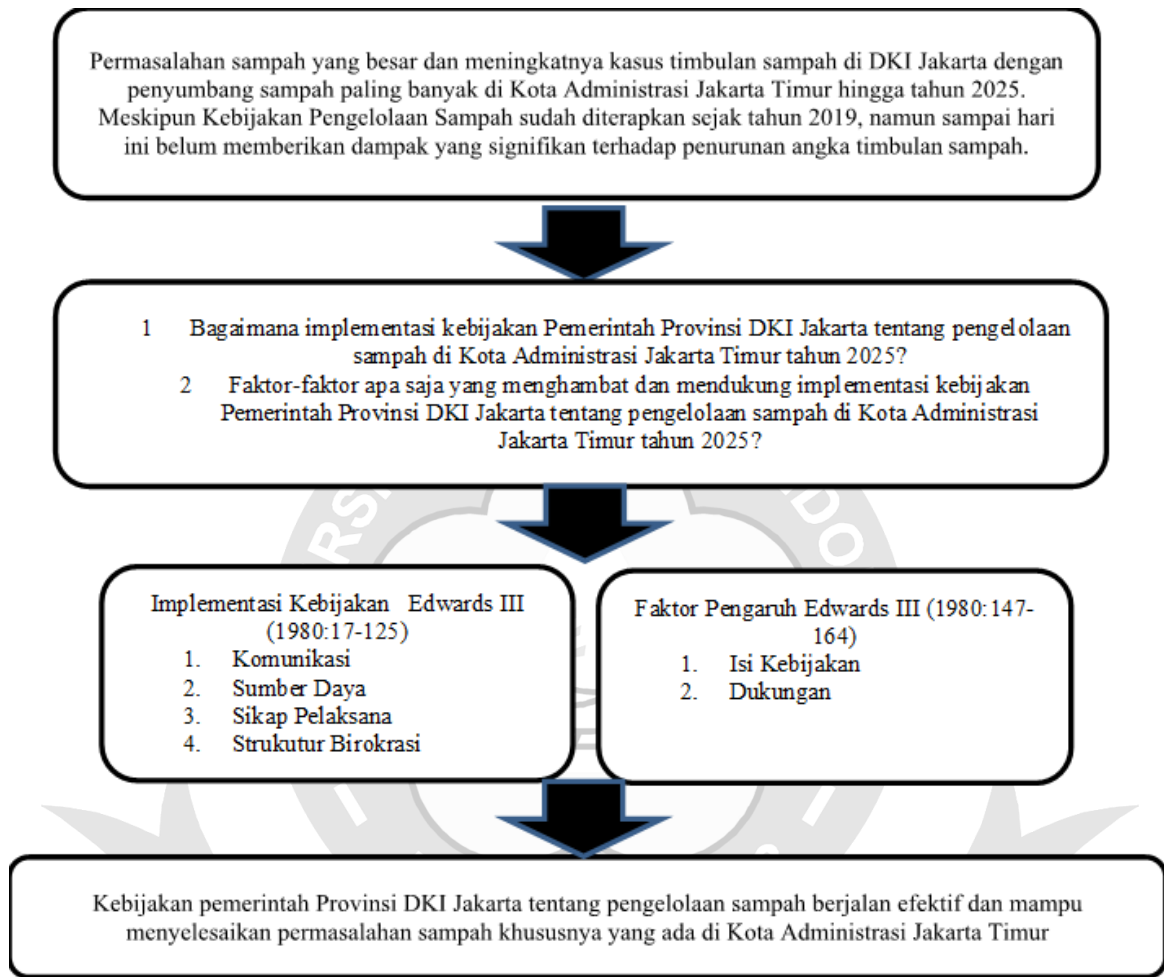
Dengan susunan yang ada menjelaskan hubungan antar unsur dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur. Dengan tujuan dari pengelolaan sampah itu sendiri mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, meningkatkan peran masyarakat untuk secara aktif mengurangi dan menangani sampah yang

berwawasan lingkungan, menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis, dan mewujudkan pelayanan prima.

1.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran visual yang tersusun secara sistematis untuk menjelaskan tahapan proses berpikir dalam suatu penelitian atau analisis. Diagram ini menampilkan komponen-komponen utama yang saling berkaitan, seperti latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, metode yang digunakan, hingga temuan dan kesimpulan. Fungsinya adalah memberikan penjelasan yang runtut mengenai logika penelitian, dimulai dari identifikasi permasalahan sampai pada hasil atau rekomendasi yang dihasilkan. Dengan adanya bagan alur pemikiran, peneliti maupun pembaca dapat memahami keterkaitan antarbagian penelitian secara lebih jelas dan terstruktur. Alur pemikiran penelitian dalam judul Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025).

Gambar 1. 2 Kerangka Pemikiran



(Sumber: hasil olahan peneliti, 2026)

Berdasarkan gambar diatas, dalam kerangka penelitian ini mengkaji fenomena permasalahan sampah yang besar dan meningkatnya kasus timbunan sampah di DKI Jakarta, tahun 2025 tercatat Jakarta Timur sebagai kota dengan kasus timbunan sampah terbanyak di DKI Jakarta. Pemerintah provinsi menerapkan kebijakan tentang pengelolaan sampah sebagai upaya pengurangan sampah di masyarakat dengan tujuan berkurangnya sampah yang ada di DKI Jakarta, khususnya di kota administrasi Jakarta Timur dengan permasalahan sampah terbanyak di DKI Jakarta. Meskipun demikian implementasi kebijakan pengelolaan sampah

ini belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan angka timbunan sampah khususnya di Kota Administrasi Jakarta Timur.

Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan penelitian mengenai bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur dan faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini akan menjawab rumusan masalah dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George Edwards III (1980:10-11) dengan 4 indikator yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Serta menggunakan konsep faktor pengaruh dari implementasi kebijakan yang dipengaruhi faktor-faktor menurut Edwards III (1980:147-164) dengan menggunakan 3 indikator yaitu isi kebijakan, dukungan, dan pembagian potensi.

Sehingga dari penelitian tersebut memperoleh output yang dihasilkan menjadi dasar terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang pengelolaan sampah yang telah diterapkan selama ini khususnya di Kota Administrasi Jakarta Timur. Hasil penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai kondisi nyata pengelolaan sampah di lapangan. Selain itu, temuan penelitian diharapkan dapat mendukung penyempurnaan implementasi pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono (2009) metode kualitatif suatu kondisi objek dimana penelitian sebagai instrumen teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumen dimana hasil penelitian bersifat temuan potensi dan masalah, keunikan objek, makna suatu peristiwa, proses, dan interaksi sosial ini (Sugiyono, 2009:15). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menjawab sejauh mana implementasi kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta tentang pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur yang dilaksanakan sesuai tujuan untuk mengurangi sampah.

Fokus penelitian ini pada analisis implementasi kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta tentang pengelolaan sampah yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, khususnya pada Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2025. Tujuan penelitian ini untuk menggali proses implementasi dan mengidentifikasi dinamika faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan dalam menghadapi permasalahan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur guna untuk memahami bagaimana pemerintah provinsi merancang dan mengimplementasikan langkah-langkah strategis, khususnya melalui kebijakan pengelolaan sampah, sebagai bentuk untuk mengurangi sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai potensi dan masalah yang dihadapi dalam mengurangi sampah dan mencegah terjadinya peningkatan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur.

1.9.2 Jenis Penelitian

Dalam Desain penelitian yang akan digunakan adalah penelitian studi kasus dengan menganalisis implementasi suatu kebijakan. Penelitian studi kasus digunakan karena bertujuan untuk mengkaji secara mendalam, suatu fenomena, peristiwa sosial tertentu dalam konteks kehidupan nyata dan dalam batasan ruang serta waktu yang jelas (Brigham et al, 2019:21), khususnya dalam implementasi kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta tentang pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2025. Dalam penelitian ini analisis implementasi digunakan sebagai upaya untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta tentang pengelolaan sampah yang sedang dilaksanakan khususnya di Kota Administrasi Jakarta Timur untuk memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi yaitu sebagai kota dengan jumlah timbulan sampah terbanyak dengan angka tertinggi di tahun 2025, sebagai upaya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono dalam buku Sena Wahyu purwanza (2022:85) bahwa teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang relevan dan akurat sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan ada tiga macam observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini dapat menggunakan teknik pengumpulan data serta penjelasan dalam mendukung penelitian sebagai berikut:

1. Wawancara: Wawancara terbuka adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan dengan menggunakan pertanyaan yang bersifat fleksibel dan tidak terstruktur

(Purwanza, 2022:85). Wawancara ini dilakukan secara terbuka dan mendalam. Dalam wawancara ini dapat dilakukan melalui secara langsung maupun telepon. Wawancara pada informan yaitu: Panitia Khusus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta, Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur, Akademisi Kebijakan Publik, Ketua RT di Kota Administrasi Jakarta Timur, serta Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Timur. Dalam wawancara ini menanyakan terkait implementasi kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta tentang pengelolaan sampah khususnya di Kota Administrasi Jakarta Timur di tahun 2025 serta faktor yang mempengaruhi implementasi baik penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan tersebut.

2. Studi Dokumen: Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai jenis dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Creswell Catatan tersebut dapat berupa catatan tertulis, laporan, foto, artikel, publikasi atau dokumen lain yang dapat memberikan informasi penting (Creswell, 2014:190). Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan berbentuk foto, antara lain foto kegiatan wawancara dengan informan, foto kondisi lingkungan sekitar. Teknik ini dipilih karena foto mampu memberikan bukti visual yang konkret mengenai situasi, kondisi persampahan di Kota Administrasi Jakarta Timur, serta data yang diperoleh timbulan sampah. Dokumen berbentuk foto juga berfungsi sebagai pendukung dari hasil wawancara dan observasi, sehingga memperkuat validitas dan akurasi data dalam penelitian mengenai implementasi kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta tentang pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2025.

1.9.4 Informan Penelitian

Informan dapat berupa orang-orang yang mempunyai pengalaman langsung atau terlibat dalam konteks yang diselidiki (Creswell, 2013:155). Melalui wawancara dengan para informan tersebut, peneliti dapat mengkaji informasi mengenai implementasi kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta tentang pengelolaan sampah khususnya di Kota Administrasi Jakarta Timur di tahun 2025. Pada pengambilan informan menggunakan purpose sampling. Menurut Patton purpose sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih responden yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau posisi yang relevan dengan tujuan penelitian (Patton, 2002:230). Teknik ini digunakan ketika peneliti ingin memilih individu yang dianggap dapat memberikan informasi yang mendalam dan spesifik terkait topik penelitian. Dalam konteks penelitian ini, purposive sampling sangat cocok untuk memilih responden yang memiliki peran langsung dalam proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah, seperti staf dinas lingkungan hidup provinsi DKI Jakarta, staff suku dinas lingkungan hidup Kota Administrasi Jakarta Timur, dan masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Timur.

Tabel 1. 9 Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan	Jumlah
1	Gusti Arief	Panitia Khusus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta	1 orang
2	Aditya Pamungkas	Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur	1 orang
3	Rosmawati	Kepala Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah Cakung	1 orang
4	Dimas Wira	Kepala Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah Duren Sawit	1 orang
5	Andika	Kepala Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah Jatinegara	1 orang
6	Putra Pangestu	Kepala Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah Ciracas	1 orang

7	Muhammad Fadil	Kepala Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah Kramat Jati	1 orang
8	Vishnu Junowo	Akademisi Kebijakan Publik	1 orang
9	Sopian Anas	Ketua RT 02/RW 03 Kebon Pala Kec. Makassar Kota Administrasi Jakarta Timur	1 Orang
10	Nanang Maulana	Masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Timur	2 Orang
	Rohman		
Total			11 Orang

(Sumber: hasil olahan peneliti tahun, 2026)

Dalam penelitian ini, setiap informan memiliki peran yang berbeda dan memberikan jenis informasi yang dibutuhkan sesuai posisi dan pengalaman mereka. Menurut (Creswell 1999:111) ada tiga macam informan dalam penelitian kualitatif. Dari tabel diatas ketujuh informan dapat menjadi informan utama, informan kunci, dan informan tambahan sebagai berikut:

1. Informan Utama: Informan utama adalah individu atau kelompok yang memiliki peran sentral dan langsung dalam proses pengambilan keputusan atau pelaksanaan kebijakan yang menjadi fokus penelitian. Mereka biasanya memiliki pengetahuan mendalam, akses langsung, dan pengaruh signifikan terhadap dinamika yang sedang diteliti (Creswell, 1999:118). Pada pemilihan informan yang menjadi informan utama yaitu Gusti Arief (sebagai Patinia Khusus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta) yang akan memberikan informasi mengenai proses pembuatan kebijakan, mulai dari perumusan, pengawasan, serta penyusunan kebijakan khususnya kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang pengelolaan sampah. Informasi dari DPRD dibutuhkan untuk memahami aspek regulatif, penganggaran, serta dinamika pembuat kebijakan di tingkat legislatif, dan Aditya Pamungkas (sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur), berperan sebagai koordinasi pelaksana

kebijakan di tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur yang akan memberikan data terkait implementasi kebijakan di lapangan, termasuk mekanisme, kapasitas, permasalahan operasional, serta Rosmawati (sebagai Kepala Pelaksana Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah Kecamatan Cakung, Duren Sawit, Jatinegara, Ciracas, Keramat Jati) yang memberikan fakta lapangan implementasi pelaksanaan pengelolaan sampah. Informasi dari suku dinas lingkungan hidup dan satuan pelaksana sangat dibutuhkan untuk melihat sejauh mana kebijakan diterapkan, dan kendala teknis yang terjadi.

2. Informan kunci: Informan kunci adalah individu yang memiliki wawasan khusus atau pengetahuan lebih mendalam mengenai aspek tertentu dari fenomena yang sedang diteliti (Creswell, 1999:119). Meskipun mereka tidak selalu terlibat langsung dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan kebijakan, informasi yang mereka miliki sangat penting untuk melihat dinamika tentang fenomena yang diteliti (Creswell, 1999:120). Pada pemilihan informan pada penelitian sebagai informan kunci Vishnu Junowo (sebagai akedimisi Kebijakan Publik), keterlibatan mereka dalam penelitian memberikan perpektif yang diperlukan untuk memahami dinamika implementasi kebijakan lingkungan yang diterapkan, serta faktor-faktor penghambat dan pendukung yang terjadi di lapangan.
3. Informan tambahan: Informan tambahan adalah individu yang memberikan informasi pelengkap yang lebih terbatas, namun tetap penting untuk mengisi kesenjangan informasi dalam penelitian (Creswell, 1999:120). Pada pemilihan informan tambahan pada penelitian ini yaitu Sopian Anas (Sebagai Ketua RT) yang memahami kondisi lapangan pada tingkat pemukiman. Informasi yang dibutuhkan dari Ketua RT

mencakup pola perilaku masyarakat, permasalahan pengelolaan sampah, ketersediaan fasilitas pembuangan, sikap masyarakat terhadap pengelolaan sampah, serta sosialisasi kebijakan tentang pengelolaan sampah. Data ini penting untuk menganalisis hambatan dan dukungan dalam implementasi kebijakan. Informan tambahan pada penelitian selanjutnya yaitu Nanang Maulana dan Rohman (sebagai masyarakat Kota Administrasi Jakarta Timur), mereka dapat digolongkan sebagai informan tambahan karena mereka memiliki pengalaman yang berguna untuk memberikan perspektif tambahan mengenai identifikasi dampak implementasi kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta tentang pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat, masalah yang masih dirasakan, serta persepsi masyarakat terhadap lingkungan, dan keterlibatan warga dalam kegiatan pengelolaan sampah.

1.9.5 Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) instrumen penelitian adalah instrumen harus dirancang dengan mempertimbangkan konteks penelitian dan karakteristik responden agar data yang diperoleh relevan dan bermanfaat dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2017:102).

Tabel 1. 10 Operasional Variabel Teoritis

Konsep/Teori	Dimensi	Indikator	Item Pertanyaan
Implementasi Kebijakan Edwards III (1980:17-125)	Komunikasi	Komunikasi yang jelas dalam implementasi kebijakan	Bagaimana bentuk komunikasi pembuat kebijakan dengan pelaksana terkait pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur? Bagaimana komunikasi tersebut dipahami dengan jelas oleh pembuat kebijakan dengan pelaksana terkait pelaksanaan di lapangan?
		Penyampaian pesan yang akurat dan konsisten	Bagaimana penyampaian pesan yang dilakukan secara akurat antara pembuat kebijakan dengan pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur? Bagaimana penyampaian pesan yang dilakukan secara konsisten antara pembuat kebijakan dengan pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur?
	Sumber Daya	Sumber Daya Manusia Yang Memadai	Bagaimana pembuat kebijakan menentukan untuk memadai jumlah tenaga pelaksanaan yang tersedia dalam melaksanakan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur? Bagaimana cara pembuat kebijakan dengan pelaksana untuk memadai pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur?
		Sumber Daya Manusia Yang Memenuhi Kualifikasi	Bagaimana pembuat kebijakan dengan pelaksana menentukan kualifikasi tenaga pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur telah diterapkan? Bagaimana pembuat kebijakan dengan pelaksana menerapkan kualifikasi, para pelaksana kebijakan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur?

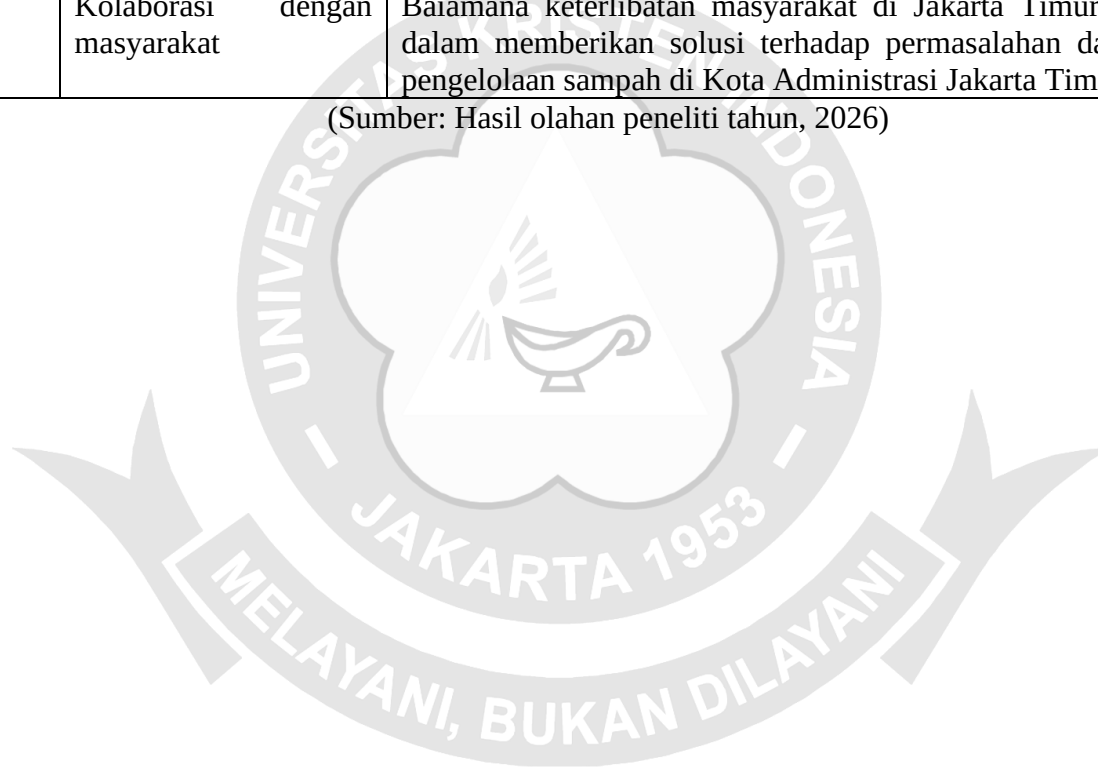
	Sikap Pelaksana	Keinginan motivasi Sikap Pelaksana	Bagaimana menumbuhkan motivasi keinginan sikap pembuat kebijakan dengan sikap pelaksana yang sudah di tanamkan dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur? Bagaimana pembuat kebijakan dengan pelaksana, menerapkan keinginan motivasi sikap pelaksana dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur?
		Kecendrungan Sikap Positif Pelaksana	Bagaimana kecendrungan sikap positif pembuat kebijakan dengan pelaksana yang telah ditanamkan dalam pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur? Bagaimana kendala dalam menanamkan sikap positif pembuat kebijakan dengan pelaksana pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur?
	Struktur Birokrasi	In efisiensi Stuktur Birokrasi	Bagaimana kompleksitas struktur birokrasi pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur? Bagaimana struktur birokrasi yang berlaku dapat mempermudah atau justru menghambat pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur?
		Standar Prosedur Operasional Birokrasi	Bagaimana standar prosedur operasional yang ada mempermudah atau justru menghambat stuktur birokrasi untuk memberikan pedoman dalam pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur? Bagaimana penerapan standar prosedur operasional birokrasi pembuat kebijakan dengan pelaksana dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur?
	Isi Kebijakan	Kebijakan baru	Bagaimana tingkat kebaruan kebijakan pengelolaan sampah serta pengalaman pelaksana kebijakan dan masyarakat dalam menerapkan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur?
		Tingkat desentralisasi	Bagaimana keterlibatan berbagai tingkat pemerintahan atau organisasi dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur? Bagaimana kejelasan pembagian kewenangan, serta koordinasi antarinstansi dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur?

		Tingkat kontroversi	Bagaimana tingkat penerimaan dari masyarakat maupun kelompok kepentingan terhadap kebijakan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur? Bagaimana tingkat penolakan dari masyarakat maupun kelompok kepentingan terhadap kebijakan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur?
		Tingkat kompleksitas	Bagaimana tujuan, prosedur, sasaran, dan aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur
		Kondisi krisis	Bagaimana pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah dalam meningkatkan urgensi kebutuhan respon cepat, serta kemampuan menghadapi situasi sampah yang semakin meningkat di Kota Administrasi Jakarta Timur?
		Kebijakan hasil putusan pengadilan	Bagaimana kewajiban hukum untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah yang berdasarkan putusan lembaga pengadilan dalam menerapkan di Kota Administrasi Jakarta Timur?
		Kombinasi karakteristik	Bagaimana kebijakan pengelolaan sampah yang memiliki lebih dari satu karakteristik yang meningkatkan tingkat kesulitan implementasi di Kota Administrasi Jakarta Timur?
	Dukungan	Monitoring pelaksanaan	Apakah adanya kegiatan pemantauan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur? Bagaimana kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur?
		Evaluasi berkala	Apakah pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah melakukan evaluasi secara rutin di Kota Administrasi Jakarta Timur Bagaimana pelaksanaan evaluasi untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur?
		Komitmen pembuat kebijakan	Bagaimana keseriusan pembuat kebijakan dalam mengawal implementasi kebijakan pengelolaan sampah berjalan sesuai tujuan di Kota Administrasi Jakarta Timur? Bagaimana keseriusan pembuat kebijakan dalam memastikan implementasi berjalan sesuai tujuan?
		Dukungan pelaksana	Apakah pembuat kebijakan dengan pelaksana mengalami keterbatasan anggaran dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur?

			Bagaimana langkah pembuat kebijakan dengan pelaksana untuk menangani permasalahan keterbatasan anggaran dari kebijakan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur?
		Dukungan organisasi	Bagaimana kesediaan pelaksana kebijakan pengelolaan sampah dalam menjalankan kebijakan di Kota Administrasi Jakarta Timur? Bagaimana komitmen pelaksana kebijakan pengelolaan sampah dalam menjalankan kebijakan di Kota Administrasi Jakarta Timur?
		Dukungan masyarakat	Bagaimana tingkat partisipasi, penerimaan, dan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur?
		Pengawasan	Bagaimana mekanisme supervisi terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur? Bagaimana mekanisme pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur?
		Tindak lanjut hasil evaluasi	Apakah adanya perbaikan atau penyempurnaan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi di Kota Administrasi Jakarta Timur? Bagaimana perbaikan atau penyempurnaan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi di Kota Administrasi Jakarta Timur?
	Pembagian Potensi	Identifikasi hambatan	Bagaimana mengidentifikasi penyebab permasalahan yang menghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur?
		Penyempurnaan kebijakan	Bagaimana upaya memperbaiki atau merevisi isi kebijakan pengelolaan sampah agar lebih sesuai dengan kondisi implementasi di Kota Administrasi Jakarta Timur?
		Penguatan kapasitas SDM	Bagaimana peningkatan kompetensi pelaksana kebijakan pengelolaan sampah melalui pendidikan, pelatihan, atau pendampingan di Kota Administrasi Jakarta Timur?
		Penguatan koordinasi	Bagaimana peningkatan kerja sama dan koordinasi antarorganisasi atau pemangku kepentingan dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur?
		Penyediaan sumber daya	Bagaimana ketersediaan anggaran, personel, sarana, dan prasarana yang memadai dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur?

		Penyempurnaan prosedur kerja	Bagaimana perbaikan standar operasional prosedur (SOP) dan mekanisme pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur?
		Adaptasi terhadap kondisi	Bagaimana kemampuan menyesuaikan strategi implementasi kebijakan pengelolaan sampah dengan kondisi dan kebutuhan di Kota Administrasi Jakarta Timur.
		Kolaborasi dengan masyarakat	Baaimana keterlibatan masyarakat di Jakarta Timur dan pemangku kepentingan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur?

(Sumber: Hasil olahan peneliti tahun, 2026)



1.9.6 Teknis Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan informasi dengan sengaja untuk membantu analisis dalam mencapai kesimpulan. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Mile and Huberman dalam buku Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan sudah jenuh (Sugiyono, 2020:541). Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

1. **Reduksi Data:** Reduksi data adalah proses berpikir sensitif yang membutuhkan kecerdasan serta pemahaman yang luas dan mendalam tentang penemuan-penemuan pengembangan teori yang penting. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
2. **Penyajian Data:** Penyajian data merupakan penelitian kualitatif bersifat naratif, Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
3. **Penarikan Kesimpulan:** penarikan kesimpulan adalah hasil masalah dan rumusan masalah yang bersifat sementara dan berkembang setelah berada di lapangan.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan diubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulannya ditemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel.

1.10 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini perlu membuat pokok inti dari setiap bab pada fenomena penelitian yang ingin diteliti dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025)”.

BAB I PENDAHULUAN: Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Kajian Pustaka, Landasan Teoritik dan Koneptual, Bagan Alur Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II GAMBARAN OBJEK PENELITIAN: Pada bab ini peneliti menyusun objek penelitian yaitu Kota Administrasi Jakarta Timur yang merupakan salah satu kota di DKI Jakarta. Fokus penelitian ini adalah menganalisis implemtasi kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta tentang pengelolaan sampah khususnya di Kota Administrasi Jakarta Timur di tahun 2025.

BAB III IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025: Pada bab ini membahas

mengenai implementasi kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta tentang pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2025 sebagai bagian dari upaya untuk memahami pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur secara menyeluruh dengan menggunakan model teori implementasi kebijakan dari Edward III (1980) dengan 4 dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi. Analisis ini dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan fasilitas persampahan, termasuk aparat pemerintah daerah, petugas lapangan, dan masyarakat sekitar.

BAB IV FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

TAHUN 2025: Pada bab ini menjelaskan faktor yang mempengaruhi baik pendung maupun penghambat penerapan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2025 yang akan dianalisis dengan menggunakan model implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor dari Edwards III (1980:147-164) dengan 3 dimensi yaitu isi kebijakan, dukungan, dan pembagian potensi.

BAB V PENUTUP: Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil proses analisis yang dilakukan peneliti dengan bab ini tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Kota Administrasi Jakarta Timur 2025) serta saran peneliti, kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah khususnya di Kota Administrasi Jakarta Timur.